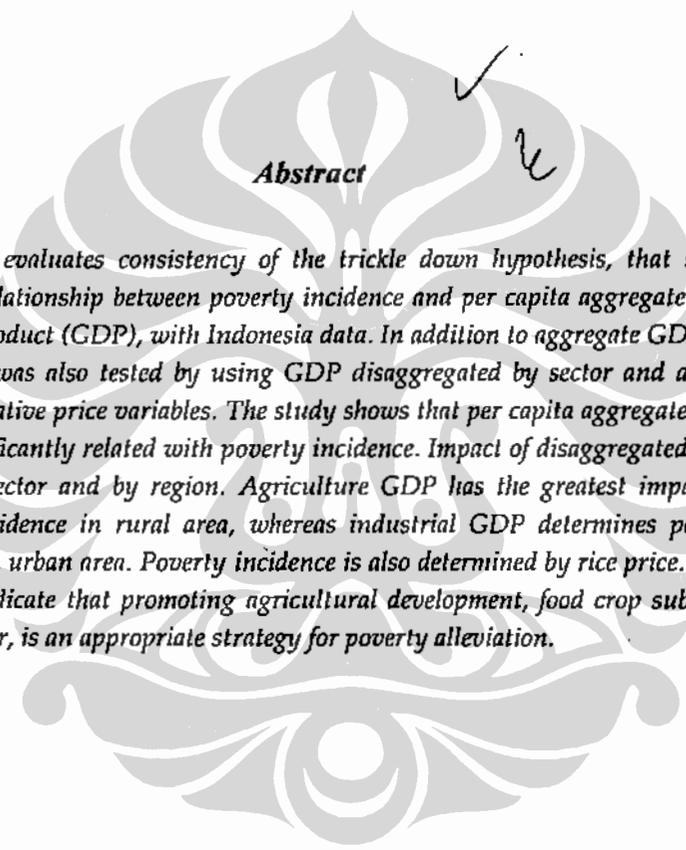


# Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis "Trickle Down" Dikaji Ulang

Pantjar Simatupang  
Saktyanu K. Dermoredjo



## Abstract

*This study evaluates consistency of the trickle down hypothesis, that shows parabolic relationship between poverty incidence and per capita aggregate gross domestic product (GDP), with Indonesia data. In addition to aggregate GDP, the hypothesis was also tested by using GDP disaggregated by sector and adding some alternative price variables. The study shows that per capita aggregate GDP is not significantly related with poverty incidence. Impact of disaggregated GDP varies by sector and by region. Agriculture GDP has the greatest impact on poverty incidence in rural area, whereas industrial GDP determines poverty incidence in urban area. Poverty incidence is also determined by rice price. These findings indicate that promoting agricultural development, food crop subsector in particular, is an appropriate strategy for poverty alleviation.*

*Kata kunci: Hipotesa tetesan ke bawah - Kemiskinan - PDB - Harga*  
*Key words: Trickle down hypothesis - Poverty - GDP - Price*

## 1. PENDAHULUAN

Hidup layak merupakan hak azasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa salah satu tugas pokok pemerintah Republik Indonesia ialah "*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*". Hal ini berarti, hidup terbebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak azasi setiap warga negara, dan adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional pada dasarnya ialah meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan.

Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ialah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti, salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional ialah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin: sektor yang layak dijadikan sebagai andalan pembangunan nasional ialah yang dampak pertumbuhannya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin relatif lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya. Pemikiran ini didasarkan pada hipotesis bahwa dampak pembangunan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin berbeda menurut sektor.

Untuk itu, "*hipotesis trickle down*" yang menunjukkan hubungan parabolik antar persentase penduduk miskin dan produksi domestik bruto (PDB) per kapita dikaji ulang dengan mendisagregasi PDB menurut sektor. Disagregasi PDB dipandang lebih tepat karena sebaran penduduk miskin berbeda menurut sektor sumber pendapatannya. Selain oleh tingkatan pendapatan, jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi oleh harga kebutuhan pokok yang menjadi penentu garis kemiskinan. Oleh karena itu, berbagai peubah harga diuji coba pula sebagai salah satu peubah penentu jumlah penduduk miskin.

## 2. PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA

### 2.1. Profil Kemiskinan Nasional

Tidak dapat dipungkiri, pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia pada masa Orde Baru (1968-98) telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara drastis. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 jumlah penduduk miskin menurun tajam dari 54,2 juta orang atau 40,08 persen dari total penduduk pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta orang atau 11,34 persen dari total penduduk pada tahun 1996. Penurunan jumlah penduduk miskin terbesar adalah di pedesaan yaitu dari 44,2 juta orang atau 40,37 persen dari total penduduk pedesaan pada tahun 1976 menjadi 15,3 juta orang atau 12,30 persen dari total penduduk pedesaan pada tahun 1996. Sedangkan di perkotaan, jumlah penduduk miskin menurun dari 10,0 juta orang atau 38,79 persen dari total penduduk perkotaan pada tahun 1976 menjadi 7,2 juta orang atau 9,71 persen dari total penduduk perkotaan pada tahun 1996. Penurunan jumlah penduduk miskin yang demikian pesat merupakan salah satu prestasi pembangunan luar biasa yang diakui oleh masyarakat internasional (World Bank, 1990).

Tabel 1  
*Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1976-1999*

Tahun	Jumlah orang (jiwa)			Persentase		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
1976	10,0	44,2	54,2	38,79	40,37	40,08
1978	8,3	38,9	47,2	30,84	33,38	33,31
1980	9,5	32,8	42,3	29,04	28,42	28,56
1981	9,3	31,3	40,6	28,06	26,49	26,85
1984	9,3	25,7	35,0	23,13	21,18	21,64
1987	9,7	20,3	30,0	20,14	16,14	17,42
1990	9,4	17,8	27,2	16,75	14,33	15,08
1993	8,7	17,2	25,9	13,45	13,79	13,67
1996	7,2	15,3	22,5	9,71	12,30	11,34
1998a	17,6	31,9	49,5	21,92	25,72	24,23
1999b	16,1	32,3	48,4	19,98	25,85	23,55
1999c	12,4	25,1	37,5	15,09	20,22	18,17

a: Desember 1998; b: Februari 1999; c: Agustus 1999

Sumber: Biro Pusat Statistik

Namun demikian, pembangunan semasa Orde Baru rupanya tidak sesuai oleh perubahan struktur ekonomi yang kuat. Krisis Baht, mata uang Thailand, yang terjadi pada bulan Juli 1997 ternyata merambat dengan cepat dan meruntuhkan nilai Rupiah sehingga Indonesia terperosok ke dalam krisis ekonomi yang selanjutnya berkembang menjadi krisis sosial-politik pada tahun 1997-99. Krisis multi dimensi tersebut telah menimbulkan stagnasi. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi hebat yang disertai oleh hiper inflasi dan pengangguran besar-besaran (Simatupang, Pasaribu dan Bahri, 2000). Sebagai akibatnya, Indonesia mengalami krisis pangan akut (Simatupang, 1999) dan jumlah penduduk miskin meningkat tajam. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, jumlah penduduk miskin meningkat tajam dari 22,5 juta orang atau 11,35 persen dari total penduduk pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta orang atau 24,23 persen dari total penduduk pada tahun 1998. Kondisi masalah kemiskinan pada tahun 1998 kira-kira sama seperti pada periode akhir tahun 1970-an.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa yang paling menderita akibat krisis ekonomi ialah kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Penduduk miskin semakin miskin sementara penduduk yang hampir miskin turun status menjadi penduduk miskin sehingga jumlah penduduk miskin bertambah banyak. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam pengentasan kemiskinan yang dipandang spektakuler dan dipuji dunia internasional pada awal tahun 1990-an hanyalah suatu fenomena semu. Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi "gelombang hampa" (*bubble economy*) melalui modal utang yang sangat besar.

Suatu hal yang menarik yang perlu diperhatikan ialah bahwa walaupun sama-sama meningkat tajam, namun peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan akibat krisis pada tahun 1998 ternyata jauh lebih besar daripada di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat dari 15,3 juta orang atau 12,30 persen dari total penduduk pada tahun 1996 menjadi 31,9 juta orang atau 25,72 persen dari total penduduk pada tahun 1998, sedangkan di perkotaan jumlah penduduk miskin meningkat dari 7,2 juta orang atau 9,71 persen dari total penduduk pada tahun 1996 menjadi 16,7 juta orang atau 21,92 persen dari total penduduk pada tahun 1998. Ini berarti bahwa

penduduk perkotaan lebih rentan terhadap gejolak ekonomi daripada penduduk pedesaan.

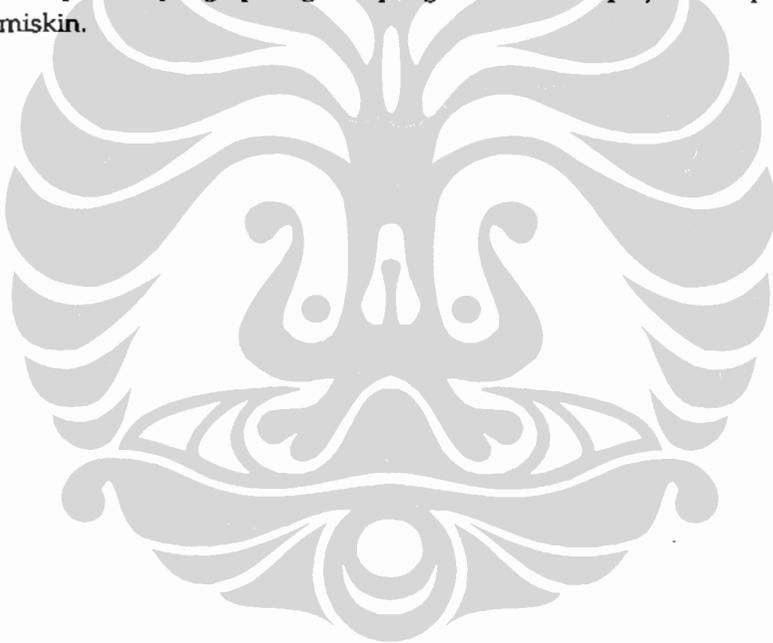
Perbedaan dinamika jumlah penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan merupakan refleksi dari perbedaan basis ekonomi. Perekonomian desa berbasis pada sektor pertanian sementara perekonomian kota berbasis pada sektor industri dan jasa. Penurunan tajam jumlah penduduk miskin di pedesaan pada periode tahun 1976-1996 (sebelum krisis) terutama merupakan hasil pertumbuhan sektor pertanian pada periode tersebut. Lebih rendahnya peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan daripada di perkotaan sebagai akibat krisis ekonomi pada tahun 1998 juga merupakan salah satu bukti lebih mantapnya efektivitas sektor pertanian dalam hal pengentasan kemiskinan. Sektor pertanian merupakan sektor penyelamat (*survival sector*) bagi penduduk yang kehilangan pekerjaan akibat krisis.

Fungsi sektor pertanian sebagai "penyelamat" (*survival sector*) dimungkinkan oleh sifat-sifat berikut. *Pertama*, proses produksi pada sektor pertanian berbasis pada sumberdaya alam domestik sehingga lebih tahan dalam menghadapi gejolak eksternal dan perekonomian makro. Sifat inilah yang membuat kenapa produksi sektor pertanian pada saat puncak krisis masih tetap tumbuh positif walaupun sektor-sektor lain mengalami kontraksi hebat. Dengan tetap dapat tumbuh positif, sementara sektor-sektor lain mengalami kontraksi maka sektor pertanian telah berperan sebagai penyangga perekonomian nasional. Lebih dari itu, mengingat sejumlah besar penduduk miskin pedesaan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka dengan tetap mampu tumbuh positif sektor pertanian telah mampu mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin khususnya yang hidup di pedesaan.

*Kedua*, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sangat fleksibel. Pekerjaan di sektor pertanian tidak memerlukan kualifikasi keahlian yang khusus dan berat sehingga dapat menampung pekerja dengan kualifikasi keahlian yang luas. Usaha pertanian merupakan usaha keluarga swakelola sehingga dapat menampung anggota keluarga yang kehilangan pekerjaan tanpa memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh laba maksimum. Oleh karena itulah, penggunaan tenaga kerja pada usahatani cenderung berlebihan sehingga menimbulkan

pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*). Walaupun kurang efisien, setidaknya para pekerja tersebut tidak menganggur total.

*Ketiga*, pertumbuhan sektor pertanian berfungsi sebagai penghambat peningkatan harga pangan yang berarti mencegah peningkatan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2 penyumbang terbesar dalam acuan pendapatan batas kemiskinan ialah komponen makanan yang mencapai sekitar 80 persen. Secara kasar, apabila indeks harga bahan pangan meningkat 10 persen maka garis kemiskinan akan meningkat sekitar 8 persen. Di sisi lain, peningkatan indeks harga bahan non-pangan sebesar 10 persen akan meningkatkan garis kemiskinan sebesar 2 persen. Dengan demikian, dampak peningkatan harga terhadap garis kemiskinan, yang berarti juga terhadap jumlah penduduk miskin, bervariasi menurut jenis komoditas. Perubahan harga kelompok komoditas pangan utama merupakan yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.



Tabel 2

*Garis Kemiskinan dan Komponen Standar Makanan dan Bukan Makanan, di Perkotaan dan Pedesaan\*, 1976-1999 (dalam Rp/kapita/bulan)*

Tahun	Perkotaan			Pedesaan		
	Komponen Makanan	Komponen Bukan Makanan	Garis Kemiskinan	Komponen Makanan	Komponen Bukan Makanan	Garis Kemiskinan
1976	3.901(82,1)	621(15,9)	4.522	2.685(93,9)	164 (6,1)	2.849
1978	4.284(84,0)	685(16,0)	4.969	2.805(93,7)	176 (6,3)	2.981
1980	5.881(83,8)	950(16,2)	6.831	4.179(93,5)	270 (6,5)	4.449
1981	8.288(82,0)	1.489(18,0)	9.777	5.517(93,5)	360 (6,5)	5.877
1984	11.527(80,9)	2.204(19,1)	13.731	7.239(93,0)	507 (7,0)	7.746
1987	-	-	17.381	-	-	10.294
1990	17.520(85,0)	3.094(15,0)	20.614	12.617(94,9)	678 (5,1)	13.295
1993	23.303(83,5)	4.602(16,5)	27.905	15.577(85,4)	2.667(14,6)	18.244
1996a	28.170(66,7)	14.050(33,3)	42.220	22.615(72,6)	8.526(27,4)	31.141
1996	29.681(77,6)	8.565(22,4)	38.246	23.197(94,6)	4.216(15,4)	27.413
Des.1998	71.058(73,3)	25.901(26,7)	96.959	56.745(78,0)	16.035(22,0)	72.780
Des.1998a	69.350(81,1)	16.168(18,9)	85.518	59.175(87,4)	8.559 (12,6)	67.734
Feb.1999	70.697(75,3)	23.172(24,7)	93.869	58.901(79,7)	14.997(20,3)	73.898
Feb.1999a	71.062(83,8)	13.711(16,2)	84.773	59.593(88,4)	7.788(11,6)	67.381
Ags.1999	64.396(71,7)	25.449(28,0)	89.845	52.319(75,4)	17.101(24,6)	69.420
Ags.1999a	63.790(80,4)	15.531(19,6)	79.321	53.497(85,4)	9.134(14,6)	62.631

Catatan:

- I. Garis kemiskinan (GK) Des.1998a, Feb.1999a, dan Ags.1999a menerapkan Standar 1996; sedangkan GK 1996a menggunakan Standar 1998.
- II. Angka-angka dalam kurung mengindikasikan persen komposisi makanan dan bukan makanan terhadap total garis kemiskinan.
- III. \*GK nasional menggunakan bundel komoditi referensi nasional, terpisah perkotaan & pedesaan.

Sumber: Irawan dan Romdiati (2000).

Hiper inflasi yang terjadi pada tahun 1998 jelas merupakan salah satu penyebab utama peningkatan jumlah penduduk miskin selama krisis ekonomi. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, hiper inflasi telah membuat garis kemiskinan nasional meningkat tajam. Garis kemiskinan di perkotaan meningkat dari Rp 38.246 pada tahun 1996 menjadi Rp 96.954 pada tahun 1998 atau sebesar 154 persen, sedangkan di pedesaan meningkat dari Rp 27.415 pada tahun 1996 menjadi Rp 72.780

pada tahun 1998 atau sebesar 165 persen. Dari data ini jelas terlihat, ajang paling menderita akibat hiper inflasi selama krisis ialah penduduk miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Sebaliknya, penurunan jumlah penduduk miskin pada periode Desember 1998 – Agustus 1999 terutama merupakan akibat penurunan garis kemiskinan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan menurun dari Rp 96.959 pada bulan Desember 1998 menjadi Rp 89.845 pada bulan Agustus 1999 atau sebesar -7,34 persen. Untuk daerah pedesaan, garis kemiskinan menurun dari Rp 72.780 pada bulan Desember 1998 menjadi Rp 69.420 pada bulan Agustus 1998 atau sebesar -4,62 persen. Penurunan laju inflasi lebih menguntungkan penduduk miskin perkotaan daripada penduduk miskin pedesaan.

Apabila diuraikan menurut sumbernya maka dari Tabel 3 tampak jelas bahwa penyebab utama peningkatan garis kemiskinan ialah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Untuk periode tahun 1996 – Desember 1998, sumbangan komponen makanan dalam peningkatan garis kemiskinan adalah 68 persen untuk daerah perkotaan dan 69 persen untuk daerah pedesaan. Untuk periode bulan Desember 1998 – Agustus 1999, sumbangan komponen makanan dalam penurunan garis kemiskinan adalah -93 persen untuk daerah perkotaan dan -135 persen untuk daerah pedesaan. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa terkendalinya harga pangan sangatlah penting dalam rangka pengentasan kemiskinan.

**Tabel 3**  
*Dekomposisi Sumber Peningkatan Nilai Garis Kemiskinan, 1996-1999 (%)*

Periode/uraian	Perkotaan	Pedesaan
I. 1996 – Desember 1998		
1. Komponen makanan	105,18 (67,92)	117,58 (69,16)
2. Komponen non-makanan	49,69 (32,08)	52,42 (30,84)
3. Total	154,87 (100)	170,00 (100)
II. Desember 1998-Agustus 1999		
1. Komponen makanan	-6,80 (-93,41)	-5,98 (-134,99)
2. Komponen non-makanan	-0,48 (-6,59)	1,55 (34,99)
3. Total	-7,28 (-100)	-4,43 (-100)

Sumber: Irawan dan Romdiati (2000).

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 menarik pula diperhatikan bahwa untuk daerah pedesaan pada periode Desember 1998 – Agustus 1999 komponen non makanan dalam garis kemiskinan tetap mengalami peningkatan, namun untuk daerah perkotaan mengalami penurunan. Hal ini merupakan refleksi dari sifat dinamika harga produk non makanan yang umumnya bersifat *fix-flex*: tidak atau sulit turun, namun mudah meningkat (fleksibel ke atas). Berbeda dengan produk non pangan, harga produk pangan biasanya bersifat *flex-flex*: fleksibel ke bawah maupun ke atas. Asimetri dalam dinamika harga ini jelas merugikan bagi penduduk miskin, khususnya penduduk miskin di pedesaan yang umumnya menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian.

Lebih jauh, tingkat keseriusan masalah kemiskinan dapat pula diukur dengan indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) sebagaimana dianjurkan oleh Foster, Greer and Thorbecke, 1984. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Irawan dan Romdiati ditampilkan pada Tabel 4. Berdasarkan kedua indikator tersebut terlihat jelas bahwa pada waktu puncak krisis multidimensi pada tahun 1998, masalah kemiskinan memburuk dengan sangat drastis. Gambaran ini menunjukkan bahwa taraf hidup penduduk miskin semakin parah. Penduduk miskin terpukul berat oleh krisis multi dimensi.

Tabel 4  
*Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahannya  
Kemiskinan (P2), 1993-1999 (%)*

Indeks/Wilayah	Tahun				
	1993	1996	1998	Feb. 1999	Agst. 1999
<b>Kedalaman kemiskinan (P1)</b>					
- Perkotaan	2,28	1,59	4,35	3,83	2,67
- Pedesaan	1,99	1,80	5,01	4,79	3,88
<b>Keparahan kemiskinan (P2)</b>					
- Perkotaan	0,61	0,41	1,09	0,93	0,74*
- Pedesaan	0,50	0,42	1,36	1,18	1,17

Sumber: Irawan dan Romdiati (2000)

## 2.2. Profil Kemiskinan Regional

Insiden kemiskinan bervariasi menurut propinsi sebagai refleksi dari perbedaan potensi sumberdaya ekonomi, kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Pada tahun 1996 (sebelum krisis) terdapat tiga propinsi yang jumlah penduduk miskinnya kurang dari 10 persen yaitu DKI Jakarta, Bali dan Sumatera Barat (Tabel 5). Pada tahun 1999 (setelah krisis) jumlah penduduk miskin di ketiga propinsi ini melonjak tajam hingga di atas 10 persen. Namun demikian, peringkat masalah kemiskinan ketiganya tidak mengalami perubahan. Persentase penduduk miskin di ketiga propinsi ini tetap yang terendah dibanding dengan seluruh propinsi lainnya (Tabel 5).

Pada tahun 1996, propinsi yang persentase jumlah penduduk miskinnya di atas 20 persen ialah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya (Papua), Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Inilah propinsi-propinsi yang paling parah masalah kemiskinannya. Krisis ekonomi semakin memperparah masalah kemiskinan di wilayah ini. Apabila ditelusuri, penyebab utama kemiskinan di propinsi-propinsi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis: (a) Tekanan penduduk atau kelangkaan sumberdaya alam: Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur; dan (b) Kelangkaan sumberdaya manusia (jumlah dan atau kualitas) dan infrastruktur ekonomi: Irian Jaya, Maluku, dan Kalimantan Barat.

Tabel 5  
*Ranking Propinsi (Perkotaan & Pedesaan) Menurut Persen  
 Penduduk Miskin (Head-count Ratio, Pa), 1996-1999  
 (Menggunakan Garis Kemiskinan Standar 1998)*

Propinsi	1996		1999		Point perubahan Pa 1996-99
	Ranking	Pa	Ranking	Pa	
Jakarta	1	4,1	1	10,3	6,2
Bali	2	6,3	2	11,0	4,7
Sumatera Barat	3	9,7	3	12,0	2,3
Kalimantan Timur	4	10,5	15	23,5	13,0
Riau	5	10,7	4	12,2	1,5
Kalimantan Tengah	6	13,3	8	17,2	3,9
Jambi	7	13,5	14	22,7	9,2
Kalimantan Selatan	8	14,0	6	14,8	0,8
Sulawesi Tengah	9	14,1	9	17,9	3,8
Aceh	10	14,3	7	16,2	1,9
Bengkulu	11	14,3	12	20,1	5,8
Sumatera Utara	12	14,4	5	14,2	-0,2
Sumatera Selatan	13	15,3	16	23,5	8,2
Sulawesi Selatan	14	15,3	10	19,0	3,7
Jawa Barat	15	15,9	13	20,5	4,6
Sulawesi Utara	16	16,7	11	19,4	2,7
Yogyakarta	17	17,8	23	29,2	11,4
Lampung	18	18,5	20	27,4	8,9
Sulawesi Tenggara	19	18,7	18	24,8	6,1
Jawa Timur	20	22,8	21	28,0	5,2
Nusa Tenggara Barat	21	23,3	17	23,9	0,6
Jawa Tengah	22	23,8	22	28,1	4,3
Kalimantan Barat	23	24,2	19	26,5	2,3
Irian Jaya (Papua)	24	28,4	25	41,5	13,1
Maluku	25	29,0	24	33,4	3,6
Nusa Tenggara Timur	26	31,4	26	42,2	11,8

Sumber: Irawan dan Romdiati (2000)

Suatu hal yang patut dicatat ialah bahwa dampak krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997 sangat bervariasi menurut propinsi. Dilihat dari peningkatan poin persentase jumlah penduduk miskin, propinsi yang paling menderita akibat krisis multi dimensi tersebut ialah Irian Jaya, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Yogyakarta dimana persentase jumlah penduduk

miskin meningkat lebih dari 10 poin. Keempat propinsi Irian Jaya dan Kalimantan Barat berbasis pada sumberdaya tambang, namun miskin sumberdaya manusia, sedangkan sektor pertaniannya relatif sangat kecil. Nusa Tenggara Timur dan Yogyakarta sangat miskin sumberdaya alam, baik lahan pertanian maupun sumberdaya tambang.

Pada sisi ekstrim, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara justru mengalami penurunan pada periode tahun 1996-99. Fakta ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi tidak selalu berdampak baik terhadap kemiskinan. Fenomena "anomali" Sumatera Utara ini dapat dijelaskan berdasarkan struktur perekonomiannya. Propinsi Sumatera Utara merupakan penghasil komoditas perkebunan ekspor yang harganya meningkat tajam akibat depresiasi Rupiah. Para petani yang menghasilkan komoditas ekspor justru menikmati keuntungan besar selama krisis ekonomi.

Gambaran lebih jauh tentang derajat kegawatan masalah kemiskinan menurun propinsi dapat dilihat berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* = P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* = P2) seperti yang ditampilkan pada Tabel 6 dan Tabel 7. Dari kedua tabel tersebut jelas terlihat bahwa derajat kegawatan kehidupan penduduk miskin sangat bervariasi antar propinsi maupun antar Desa-Kota dalam satu propinsi. Kehidupan penduduk miskin yang paling gawat sebelum krisis ialah di Irian Jaya, Maluku, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Secara umum, kondisi kehidupan penduduk miskin di wilayah Indonesia bagian timur jauh lebih parah daripada di wilayah Indonesia bagian barat.

Krisis ekonomi ternyata tidak membuat kondisi kehidupan penduduk miskin semakin gawat baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Walaupun persentase jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara setelah krisis cenderung menurun (Tabel 5), namun berdasarkan data pada Tabel 6 – Tabel 7 terlihat jelas bahwa kondisi kehidupan penduduk miskin semakin parah. Krisis ekonomi telah membuat kehidupan penduduk miskin semakin gawat atau semakin timpang diantara sesamanya. Dari Tabel 6 dan Tabel 7 juga terlihat bahwa yang paling menderita akibat krisis ekonomi ialah penduduk miskin di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini merupakan akibat dari ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Tabel 6

*Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan (Poverty Gap and Severity Index) di Pedesaan Menurut Wilayah/Propinsi, 1993-1999*

Propinsi	Kedalaman kemiskinan				Keparahan kemiskinan			
	1993	1996	1998	1999	1993	1996	1998	1999
Aceh	1,841	1,682	2,277	2,602	0,407	0,379	0,460	0,610
Sumut	2,272	1,875		2,515	0,720	0,470		0,624
Sumatera	1,983	1,392		2,337	0,415	0,311		0,504
Barat	1,727	1,425	2,179	2,655	0,416	0,364	0,531	0,833
Riau	2,141	1,628		4,198	0,597	0,484		0,981
Jambi								
Sumsel	1,479	1,194		3,935	0,310	0,248		0,960
Bengkulu	1,790	1,663	3,821	4,175	0,378	0,392	0,975	0,955
Lampung	1,494	1,490		6,595	0,299	0,320		1,972
Jawa Barat	1,414	1,270	2,788	3,578	0,341	0,261	0,655	0,880
Jawa Tengah	2,067	2,228	6,088	4,599	0,484	0,543	1,679	1,193
Yogyakarta	1,064	1,152		5,053	0,197	0,284		1,332
Jawa Timur	1,518	1,544	4,494	5,273	0,380	0,346	1,202	1,452
Bali	1,485	0,465		1,553	0,429	0,086		0,402
Kalbar	4,725	3,602		6,666	1,178	0,771		1,873
Kalteng	3,168	1,770		3,574	0,668	0,363		0,985
Kalsel	3,394	2,229		4,337	0,877	0,498		1,108
Kaltim	3,179	2,083		4,312	1,046	0,563		1,168
Sulut	2,198	1,984		4,883	0,511	0,486		1,559
Sulteng	1,660	1,215	8,560	5,365	0,434	0,276	2,947	1,801
Sulse	0,858	0,852		3,610	0,199	0,177		0,894
Sultra	1,551	0,990		5,888	0,323	0,211		1,687
NTB	2,497	2,552		3,654	0,560	0,583		0,857
NTT	3,917	3,590		10,736	0,991	0,969		3,314
Maluku	6,074	4,676		8,565	1,745	1,319		2,439
Irian Jaya	6,259	4,915		19,866	1,977	1,399		9,082
INDONESIA	1,992	1,803	5,005	4,737	0,497	0,425	1,475	1,324

Sumber: Irawan dan Romdiati (2000).

**Tabel 7**  
**Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan (Poverty Gap and Severity Index) di Pedesaan Menurut Wilayah/Propinsi, 1993-1999**

Propinsi	Kedalaman kemiskinan				Keparahannya kemiskinan			
	1993	1996	1998	1999	1993	1996	1998	1999
Aceh	1,911	1,469	2,537	2,128	0,559	0,402	0,658	0,522
Sumut	1,602	1,359		2,574	0,342	0,327		0,598
Sumatera	0,983	0,909		2,912	0,191	0,221		0,658
Barat	0,894	0,622	1,754	1,565	0,235	0,155	0,348	0,305
Riau	1,351	0,979		4,725	0,281	0,205		1,358
Jambi								
Sumsel	3,597	1,829		4,662	1,035	0,381		1,353
Bengkulu	1,307	0,873	3,503	3,518	0,262	0,195	0,852	0,919
Lampung	1,779	1,376		3,685	0,418	0,309		0,914
DKI Jakarta	0,875	0,353	2,609	1,033	0,212	0,079	0,630	0,257
Jawa Barat	2,741	1,971	3,478	3,929	0,752	0,560	0,955	1,199
Jawa Tengah	2,815	1,999	7,735	4,869	0,736	0,532	2,409	1,335
Yogyakarta	2,447	1,667		3,720	0,659	0,378		1,005
Jawa Timur	2,858	2,029	4,547	3,704	0,783	0,467	1,299	0,946
Bali	2,146	0,786		1,490	0,576	0,163		0,345
Kalbar	3,496	2,242		2,175	0,894	0,656		0,497
Kalteng	2,276	1,224		1,149	0,550	0,373		0,265
Kalsel	1,997	1,791		2,476	0,510	0,432		0,612
Kaltim	2,084	0,791		2,404	0,567	0,189		0,712
Sulut	1,023	0,995		2,824	0,254	0,231		0,763
Sulteng	1,015	0,647	5,261	4,193	0,259	0,150	1,595	1,296
Sulsel	,259	1,655		3,341	0,740	0,396		0,801
Sultra	1,138	2,062		2,916	0,192	0,877		0,849
NTB	4,310	3,314		5,423	1,249	0,809		1,615
NTT	2,701	2,324		6,293	0,684	0,580		1,838
Maluku	1,180	0,913		4,776	0,320	0,193		1,289
Irian Jaya	2,218	1,463		2,539	0,673	0,324		0,704
INDONESIA	2,285	1,588	4,351	3,409	0,611	0,406	1,267	0,937

Sumber: Irawan dan Romdiati (2000).

### 2.3. Profil Kemiskinan Menurut Lapangan Kerja

Dari data yang ditampilkan pada Tabel 8 ternyata bahwa sebagian besar penduduk miskin menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian. Secara keseluruhan, sekitar 52 persen rumah tangga miskin bekerja pada usaha pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya. Apabila dilihat menurut wilayah, maka untuk wilayah pedesaan penduduk miskin yang

pekerjaan utamanya pada usaha pertanian mencapai sekitar 72 persen. Dengan demikian, pembangunan pertanian merupakan kunci utama keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

**Tabel 8**  
*Kemiskinan Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Penghasilan di Daerah Perkotaan dan Pedesaan, 1999*

Sumber utama penghasilan rumah tangga		Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan & Pedesaan	
		Persen rumah tangga miskin	Persen thd. total rumah tangga miskin	Persen rumah tangga miskin	Persen thd. total rumah tangga miskin	Persen rumah tangga miskin	Persen thd. total rumah tangga miskin
Pertanian	Buruh	39,8	8,7	31,9	16,4	33,5	13,6
	Pengusaha	31,2	7,5	26,8	55,2	27,0	37,9
Pertambangan/ penggalian	Buruh	14,5	0,5	23,6	0,5	19,1	0,5
	Pengusaha	49,1	0,6	20,4	0,3	28,5	0,4
Industri pengolahan	Buruh	22,2	12,0	15,0	2,5	19,7	5,9
	Pengusaha	17,9	2,2	22,8	2,8	21,0	2,6
Listrik, gas dan air	Buruh	14,8	0,3	14,8	0,1	14,8	0,2
	Pengusaha	55,9	0,1	0,0	0,0	33,6	0,0
Bangunan/ konstruksi	Buruh	27,7	6,9	21,6	3,4	24,5	4,7
	Pengusaha	18,9	0,8	16,5	0,4	17,6	0,5
Perdagangan	Buruh	18,7	5,1	17,8	0,7	18,5	2,3
	Pengusaha	17,3	17,1	14,4	6,4	16,0	10,3
Angkutan dan komunikasi	Buruh	17,4	3,3	13,3	0,8	15,9	1,7
	Pengusaha	28,0	7,0	17,6	2,0	23,4	3,8
Perbankan, keuangan	Buruh	9,5	0,8	9,6	0,1	9,5	0,3
	Pengusaha	7,4	0,3	12,6	0,1	8,4	0,2
Jasa lainnya	Buruh	13,5	12,1	10,6	3,4	12,4	6,6
	Pengusaha	17,3	4,0	14,9	1,1	16,4	2,2
Lainnya	Buruh	18,8	0,2	25,7	0,1	22,0	0,2
	Pengusaha	25,8	0,1	29,3	0,2	28,5	0,2
Penerimaan pendapatan		21,1	10,4	17,7	3,5	19,7	6,0
Seluruh rumah tangga miskin		20,2	100,0	22,9	100,0	21,8	100,0

Sumber: Irawan dan Romdiati (2000)

Pekerjaan utama penduduk miskin di wilayah perkotaan tersebar relatif merata pada banyak sektor usaha. Menarik untuk diperhatikan, walau tidak dominan seperti di wilayah pedesaan, ternyata untuk wilayah perkotaan pun usaha pertanian, merupakan lapangan kerja utama penduduk miskin peringkat kedua tertinggi setelah usaha perdagangan. Jumlah penduduk miskin perkotaan yang pekerjaan utamanya pada usaha perdagangan adalah 17,2 persen, sedangkan yang pekerjaan utamanya pada usaha pertanian mencapai 16,2 persen. Lapangan kerja utama lainnya ialah sektor jasa umum (16,1%) dan industri pengolahan 14,2 persen. Kiranya patut dicatat, kemungkinan besar sejumlah penduduk miskin yang bekerja pada usaha perdagangan, jasa lainnya dan industri pengolahan berkaitan dengan bidang agribisnis (pedagang produk pertanian, agroindustri) sehingga secara langsung sangat tergantung pada keragaman sektor pertanian. Oleh karena itu, keragaman sektor pertanian juga sangat berpengaruh terhadap lapangan kerja dan pendapatan penduduk miskin di perkotaan.

Berdasarkan profil lapangan kerja utama penduduk miskin seperti yang diuraikan di atas maka dapatlah kiranya disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, dalam jangka pendek, strategi pengentasan kemiskinan yang paling tepat ialah memacu perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian. Hal ini merupakan implikasi langsung dari kenyataan bahwa sebagian besar (52%) penduduk miskin di Indonesia bekerja pada usaha pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya. *Kedua*, pertumbuhan dan perkembangan usaha pertanian juga efektif untuk pengentasan kemiskinan di perkotaan. Hal ini merupakan implikasi dari kenyataan bahwa 16,2 persen (peringkat kedua setelah usaha perdagangan) penduduk miskin di perkotaan bekerja langsung pada usaha pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya. Disamping itu, sejumlah pekerjaan perdagangan, industri pengolahan, dan sebagainya, berkaitan dengan produk pertanian yang berarti merupakan lapangan kerja turunan dari usaha pertanian. *Ketiga*, dalam jangka pendek, pemacuan produksi industri pengolahan relatif kurang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan implikasi dari kenyataan bahwa jumlah penduduk miskin yang menggantungkan hidupnya pada industri pengolahan relatif kecil. *Keempat*, sebagai implikasi dari ketiga kesimpulan sebelumnya, pembangunan berbasis sektor pertanian lebih

efektif untuk pengentasan kemiskinan daripada pembangunan berfokus pada industri pengolahan.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Analisis

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara umumnya diukur secara agregat yang secara empiris diukur dengan Produksi Domestik Bruto (*Gross Domestic Product* atau GDP) per kapita. Di sisi lain, laju pertumbuhan GDP merupakan indikator utama fundamental ekonomi sehingga merupakan target utama pembangunan setiap negara. Sejalan dengan itu, penelitian tentang efektivitas pembangunan dalam pengentasan kemiskinan umumnya dilakukan dengan mengkaji hubungan antara tingkat kemiskinan dan atau pemerataan pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan GDP. Dalam konteks ini pandangan yang paling terkenal ialah hipotesis "tetesan pembangunan" atau *trickle down hypothesis* yang dilontarkan oleh Kuznets (1955) atau hipotesa U terbalik (*inverted U hypothesis*) yang mengatakan bahwa hubungan pendapatan per kapita atau pertumbuhan GDP dengan tingkat kemiskinan atau pemerataan mengikuti pola parabola terbalik. Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan GDP mula-mula berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan, namun setelah tingkat tertentu hubungan tersebut berubah menjadi positif. Secara matematis, *trickle down hypothesis* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{POV} &= f(\text{GDPC}) \dots\dots\dots (1) \\ \frac{d \text{ POV}}{d \text{ GDPC}} &> 0 \\ \frac{d^2 \text{ POV}}{d \text{ GDPC}^2} &< 0 \end{aligned}$$

dimana:

POV = tingkat kemiskinan atau pemerataan pendapatan  
GDPC = GDP per kapita

Dalam penelitian empiris, bentuk fungsi kongkrit hipotesis “tetesan pembangunan” biasanya dinyatakan dengan fungsi kuadrat, baik kuadrat dalam nilai-nilai asli maupun kwadrat dalam nilai-nilai logaritma:

$$POV = a + b \text{ GDPC} + c \text{ GDPC}^2 \dots\dots\dots (2)$$

Persamaan (2) dapat diduga dengan metode regresi. Hipotesis “tetesan pembangunan” dapat diterima jika  $b > 0$  dan  $c < 0$ . Apabila ternyata  $b > 0$  dan  $c > 0$  atau  $b > 0$  dan  $c = 0$  maka yang terjadi ialah kebalikan dari hipotesis tetesan pembangunan: pertumbuhan ekonomi meningkatkan jumlah penduduk miskin atau pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.

Metode pengujian hipotesis “tetesan pembangunan” Kuznets dengan regresi fungsi kuadrat seperti pada persamaan: (1) dinilai mengandung beberapa kelemahan konseptual. *Pertama*, metode tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa struktur sumber GDP menurut sektor konstan atau tidak berpengaruh terhadap kemiskinan atau pemerataan pendapatan. Namun bukti empiris menunjukkan bahwa struktur GDP menurut sektor berubah cepat dan memang berpengaruh terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan (World Bank, 1990). Penurunan kontribusi GDP seiring dengan pertumbuhan ekonomi merupakan fakta umum yang berlaku di seluruh negara (Anderson, 1987; Simatupang, 1992). Sementara itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat GDP per kapita atau pertumbuhan GDP di sektor pertanian lebih efektif dalam penurunan jumlah penduduk miskin atau pemerataan pendapatan (World Bank, 1990; Chatterjee, 1995).

*Kedua*, jumlah penduduk miskin dan tingkat pemerataan tidak hanya ditentukan tingkat pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan GDP. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pada nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang didominasi oleh kebutuhan pangan. Oleh karena itu tingkat harga, khususnya harga pangan, sangat berpengaruh terhadap batas kemiskinan yang berarti pula terhadap jumlah penduduk miskin (Ahluwalia, 1985; Sen, 1985). Di sisi lain, tingkat harga juga sangat berpengaruh terhadap laba usaha dan

upah pekerja sehingga perbedaan laju perubahan harga menurut sektor turut berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dan jumlah penduduk miskin.

*Ketiga*, khususnya sebagai implikasi dari dua argumen di atas, determinan kemiskinan dan pemerataan bervariasi menurut wilayah. Determinan kemiskinan di pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini berarti, pendekatan agregatif seperti pada persamaan (2) dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang valid sehingga implikasi kebijakan yang dihasilkannya pun tidak sesuai pula.

Berdasarkan pemikiran di atas maka secara umum dapat disimpulkan bahwa model standar seperti pada persamaan (2) tidak sesuai secara konseptual sehingga perlu disesuaikan. Lebih dari itu, model standar tersebut tidak dapat menguji kelebihan sektor pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan, khususnya di daerah penelitian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan terutama ditentukan oleh pertumbuhan atau pendapatan per kapita di sektor pertanian dan harga pangan (Desai, 1985; Ahlawalia, 1985; Ghoser, 1993). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuji beberapa model analisis. *Pertama*, model standar persamaan (2) akan digunakan baik untuk data kemiskinan agregat (nasional) maupun data disagregat menurut desa dan kota. *Kedua*, model standar (2) direvisi dengan memasukkan peubah indeks harga konsumen, indeks harga pangan atau harga beras:

$$POV = a + b \text{GDPC} + c \text{GDPC}^2 + d \text{PI} \dots\dots\dots (3)$$

dimana:

PI = indeks harga konsumen/indeks harga pangan serta harga beras

Hipotesis yang akan diuji adalah koefisien dugaan  $d > 0$  baik untuk peubah indeks harga konsumen, indeks harga pangan atau harga beras. Dihipotesiskan pula bahwa peubah indeks harga pangan khususnya beras, lebih mampu menjelaskan variasi kemiskinan daripada indeks harga konsumen, khususnya di daerah pedesaan. Apabila kedua hipotesis tersebut diterima maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor pertanian berkontribusi langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui penurunan harga pangan/beras.

*Ketiga*, model pada persamaan (3) direvisi lagi dengan mendisagregasi GDP menjadi dua bagian yaitu GDP sektor pertanian dan GDP sektor non pertanian:

$$POV = a + b_1 GDP_A + b_2 GDP_{NA} + c_1 GDP_A^2 + c_2 GDP_{NA}^2 + d PI \dots \quad (4)$$

dimana:

$GDP_A$  = GDP per kapita dari sektor pertanian

$GDP_{NA}$  = GDP per kapita dari sektor non-pertanian

Model regresi pada persamaan (4) digunakan untuk menguji hipotesis bahwa pemacuan pertumbuhan GDP di sektor pertanian lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan daripada pertumbuhan GDP di sektor non pertanian. Hipotesis ini dapat diterima secara statistik apabila  $b_1 + 2c_1 GDP_A < 0$  dan  $b_1 + 2c_1 GDP_A < b_2 + 2c_2 GDP_{NA}$ .

*Keempat*, disagregasi GDP diubah menjadi GDP sektor pertanian, industri dan sektor lainnya, persamaan (4) menjadi:

$$POV = a + b_1 GDP_A + b_2 GDP_I + b_3 GDP_{PL} + c_1 GDP_A^2 + c_2 GDP_I^2 + c_3 GDP_{PL}^2 + d PI \dots \quad (5)$$

dimana:

$GDP_I$  = GDP per kapita sektor industri

$GDP_{PL}$  = GDP per kapita sektor non-industri

Model regresi (5) digunakan untuk menguji keunggulan pertumbuhan sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan sektor industri. Uji hipotesis ini sangat penting karena opsi sektor andalan pembangunan biasanya adalah antara sektor pertanian atau sektor industri. Penulis sangat menyadari bahwa model yang lebih tepat untuk menguji hipotesis tersebut ialah mendisagregasi GDP total menjadi setidaknya GDP sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa dan sektor pertambangan. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data deret waktu yang tersedia.

Estimasi dilakukan dengan dua alternatif peubah tak bebas (*dependent variable*) masing-masing dengan bentuk fungsi yang berbeda. Alternatif pertama ialah jumlah absolut penduduk miskin dengan bentuk fungsi logaritma berganda (*double log*).

$$LJPM = a + b_1 LGDP + b_2 LGDPK + c LIH + d T \dots\dots\dots (6)$$

dimana:

- LJPM = logaritma jumlah penduduk miskin
- LGDP = logaritma pendapatan per kapita
- LGDPK = LGDP kuadrat
- LIH = logaritma peubah harga
- T = tren waktu

Alternatif kedua ialah mempergunakan persentase jumlah penduduk miskin sebagai peubah bebas dengan bentuk fungsi varian logistik. Varian fungsi logistik sengaja dipilih untuk membatasi bahwa parameter penduduk miskin berada pada selang 0 – 100 persen. Bentuk fungsi yang diduga ialah :

$$LOGIT = a + b_1 LGDP + b_2 LGDPK + c LIH + d T \dots\dots\dots (7)$$

dimana:

- LOGIT = LOG(PPM/(100 - PPM))
- PPM = persentase penduduk miskin

Kedua model regresi di atas diduga dengan metode kuadrat terkecil sederhana (OLS). Masing-masing model diduga dengan tiga alternatif peubah harga: indeks harga konsumen, indeks harga makanan dan harga beras. Selain GDP per kapita agregat, pendugaan juga dilakukan dengan dua alternatif disagregasi GDP: pertanian-non pertanian dan industri-non industri. Varian-varian ini sengaja dirancang untuk menguji keunggulan relatif sektor pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data yang digunakan ialah data deret waktu (*time series*) dalam kurun waktu 1976-1999. Seluruh data diperoleh dari BPS.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh harga dikaji dengan tiga alternatif peubah yaitu indeks harga konsumen, indeks harga makanan dan harga beras. Setelah melakukan eksperimen dengan berbagai alternatif, ternyata yang paling baik menjelaskan variasi kemiskinan ialah model persentase non-linier. Hasil dugaan ditampilkan pada Tabel 9-11.

Tabel 9 menampilkan hasil dugaan regresi untuk kemiskinan di seluruh Indonesia (desa + kota). Berdasarkan kriteria koefisien determinasi ( $R^2$ ) maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling baik menjelaskan variasi kemiskinan di Indonesia ialah Model-3 yaitu model yang mempergunakan harga beras sebagai salah satu peubah bebasnya. Peringkat kedua ialah Model-2 yang menggunakan peubah indeks harga makanan. Model-1, yang menggunakan indeks harga konsumen, merupakan model terburuk. Koefisien dugaan untuk indeks harga konsumen tidak nyata secara statistik, untuk indeks harga makanan nyata pada taraf 0,05, sedangkan untuk harga beras nyata pada taraf 0,01. Dengan demikian kiranya dapat disimpulkan bahwa peubah harga yang paling baik menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin di Indonesia ialah harga beras. Peningkatan harga beras akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Hal ini adalah wajar karena bahan makanan, khususnya beras, merupakan komponen terbesar dalam nilai garis kemiskinan.

Tabel 9

*Dugaan Regresi GDP Agregat per Kapita, Harga Barang Konsumsi dan Tren Waktu Terhadap Kemiskinan Total di Indonesia*

Peubah bebas	Model-1	Model-2	Model-3
Konstanta	399 (302)	269 (207)	107 (192)
GDP agregat per kapita	-60,30 (44,92)	-40,71 (1,136)	-17,21 (28,34)
GDP agregat per kapita kuadrat	2,2617 (1,668)	1,5298 (1,136)	0,6764 (1,047)
Indeks harga konsumen	1,6440 (0,8245)	-	-
Indeks harga makanan	-	1,3295* (0,3295)	-
Harga beras	-	-	1,2502** (4,292)
Tren waktu	-0,2024 (0,1030)	-0,1802* (0,0522)	-0,2069** (0,0512)
R <sup>2</sup>	0,8128	0,9109	0,9283
Adjusted R <sup>2</sup>	0,6630	0,8396	0,87098

Keterangan : angka dalam tanda () adalah standar deviasi

\* nyata pada taraf 0,05; \*\* nyata pada taraf 0,01

Dari Tabel 9 dapat pula dilihat bahwa GDP agregat per kapita tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin, baik dalam bentuk peubah bebas linier maupun dalam bentuk peubah bebas kuadratik, untuk ketiga alternatif model. Selain harga makanan khususnya harga beras, peubah lain yang signifikan mempengaruhi jumlah kemiskinan ialah tren waktu. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai faktor selain harga dan GDP per kapita secara keseluruhan cenderung menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Termasuk dalam hal ini diantaranya ialah pembangunan berbagai infrastruktur pemberdayaan penduduk seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan tentunya program khusus pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Secara kualitatif, kesimpulan di atas tidak berubah walaupun regresi dilakukan dengan memisahkan wilayah pedesaan dan perkotaan (Tabel Lampiran 1 dan 2). Baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan yang paling menentukan variasi jumlah penduduk miskin ialah harga makanan (khususnya beras) dan tren waktu. GDP agregat per kapita tidak berpengaruh nyata secara statistik. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dikaji ialah apakah tidak nyatanya GDP per kapita merupakan akibat dari agregasi. Untuk itu, berikut ini dilakukan analisis disagregasi GDP.

Penggunaan dua cara agregasi yaitu: (a) sektor pertanian dan sektor non-pertanian, serta (b) sektor pertanian, industri dan sektor lainnya, akan dapat diketahui apakah peningkatan GDP sektor pertanian lebih efektif menurunkan jumlah penduduk miskin daripada peningkatan GDP sektor industri. Dari kesimpulan ini akan dapat diketahui apakah strategi pembangunan berbasis sektor pertanian lebih efektif mengentaskan kemiskinan daripada strategi pembangunan berbasis industri.

Hasil dugaan regresi dengan disagregasi sektor pertanian dan sektor non-pertanian untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan (desa+kota) ditampilkan pada Tabel 10. Hasil dugaan menunjukkan bahwa koefisien GDP per kapita sektor pertanian nyata secara statistik untuk ketiga model yang diuji, sedangkan koefisien GDP per kapita sektor non pertanian hanya nyata secara statistik pada Model-3 (yang menggunakan harga beras sebagai salah satu peubah bebas). Hal ini menunjukkan bahwa GDP per kapita sektor pertanian lebih berkaitan erat dengan variasi kemiskinan di Indonesia daripada GDP per kapita sektor non pertanian. Dari hasil dugaan regresi ini kembali terbukti bahwa harga beras lebih berkaitan erat dengan variasi kemiskinan dibandingkan dengan peubah harga lainnya. Menarik pula diperhatikan bahwa setelah GDP didisagregasi peubah tren waktu menjadi tidak nyata. Variasi jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan dengan baik oleh variasi GDP per kapita terdisagregasi dan harga beras.

Koefisien dugaan peubah GDP per kapita sektor pertanian bertanda negatif sedangkan peubah kuadratnya bertanda positif. Hal ini berarti bahwa pendapatan per kapita sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin dengan dampak yang semakin menurun. Sebaliknya, koefisien dugaan peubah GDP per kapita sektor non pertanian bertanda positif sedangkan peubah kuadratnya bertanda negatif. Dampak GDP per kapita sektor non-pertanian terhadap jumlah penduduk miskin mula-mula positif lalu kemudian menurun apabila nilainya semakin tinggi. Dengan perkataan lain, dampak GDP per kapita sektor non-pertanian mengikuti pola hipotesis *trickle down*. Peningkatan GDP per kapita sektor non-pertanian mula-mula meningkatkan jumlah penduduk miskin, namun apabila sudah cukup tinggi dampaknya baru berubah menjadi menurunkan jumlah penduduk miskin.



Tabel 10  
*Dugaan Regresi Perilaku Kemiskinan Total Indonesia dengan Disagregasi  
 GDP Menurut Sektor Pertanian dan Non-Pertanian*

Peubah bebas	Model-1	Model-2	Model-3
Konstanta	6064* (1290)	4911* (1127)	4504* (789)
GDP per kapita sektor pertanian	-1081* (243)	-882* (208)	-821* (144)
GDP per kapita sektor pertanian kuadrat	46,18** (10,41)	37,71* (8,89)	35,12* (6,13)
GDP per kapita sektor non pertanian	43,35 (26,92)	39,32 (19,92)	49,94* (13,06)
GDP per kapita sektor non-pertanian kuadrat	-1,7414 (1,039)	-1,5642 (0,7700)	-1,7980* (0,5046)
Indeks harga konsumen	0,7274 (0,4553)	-	-
Indeks harga makanan	-	0,7309 (0,2707)	-
Harga beras	-	-	0,7534* (0,1698)
Tren waktu	-0,0186 (0,0786)	-0,0579 (0,0617)	-0,0915 (0,0452)
R <sup>2</sup>	0,9762	0,9871	0,9942
Adjusted R <sup>2</sup>	0,9285	0,9614	0,9825

Keterangan: angka dalam tanda () adalah standar deviasi

\* nyata pada taraf 0,05; \*\* nyata pada taraf 0,01

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah kesimpulan di atas masih valid apabila jumlah penduduk miskin dipisah menurut wilayah pedesaan dan perkotaan? Hasil dugaan regresi ditampilkan pada Tabel Lampiran 3 dan 4. Hasil dugaan pada Tabel Lampiran 3 menunjukkan bahwa GDP per kapita sektor non-pertanian tidak berpengaruh nyata secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin di pedesaan. Variasi jumlah penduduk miskin di pedesaan dapat terutama ditentukan oleh GDP per kapita di sektor pertanian dan harga beras. Hal ini adalah wajar karena penduduk miskin di pedesaan terutama menggantungkan hidupnya pada usaha pertanian. Sedangkan hasil dugaan regresi pada Tabel Lampiran 4 sungguh menarik. Jumlah penduduk di pedesaan tidak hanya dipengaruhi secara nyata oleh pendapatan per kapita di sektor non pertanian tetapi juga oleh pendapatan per kapita di sektor pertanian dan harga beras. Hal ini membuktikan bahwa pemacuan pertumbuhan sektor pertanian efektif untuk upaya pengentasan kemiskinan, tidak hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Strategi pembangunan ekonomi yang mengandalkan sektor pertanian sangat tepat untuk upaya pengentasan kemiskinan secara nasional.

Untuk mengetahui dengan lebih tegas apakah efektivitas sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan berbeda dengan sektor industri maka analisis regresi dilanjutkan dengan mendisagregasi PDB menurut sektor pertanian, industri dan sektor lainnya. Peubah tren waktu tidak disertakan karena tidak nyata dan untuk menambah derajat bebas. Peubah harga yang digunakan ialah harga beras karena sudah terbukti yang paling mampu menjelaskan kemiskinan dibandingkan dengan peubah harga lainnya. Hasil dugaan regresi ditampilkan pada Tabel 11.

Dari hasil dugaan regresi pada Tabel 11 kembali terbukti bahwa yang paling konsisten berpengaruh nyata terhadap kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan ialah harga beras. Peningkatan harga beras meningkatkan jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dampak PDB per kapita berbeda menurut wilayah maupun menurut sumber PDB tersebut. Untuk wilayah pedesaan, yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan ialah PDB per kapita sektor pertanian dan sektor jasa plus pertambangan (kategori sektor lainnya), sedangkan PDB per kapita sektor industri tidak berpengaruh nyata. Untuk wilayah perkotaan, yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan

ialah PDB per kapita sektor industri. Untuk kemiskinan di seluruh Indonesia yang berpengaruh nyata ialah PDB per kapita sektor pertanian dan sektor jasa plus pertambangan. Dengan demikian dapatlah kiranya disimpulkan bahwa strategi yang paling efektif untuk pengentasan kemiskinan ialah pemacuan pembangunan pertanian.

**Tabel 11**  
*Dugaan Perilaku Kemiskinan dengan Tren Disagregasi GDP Menurut Sektor Pertanian, Industri dan Sektor Lainnya*

Peubah bebas	Desa	Kota		Desa+ Kota
		Model-1	Model-2	
Konstanta	2853 (757)	1967 (1852)	34,62 (18,41)	2646 (987)
GDP per kapita sektor pertanian	-545** (129)	-413 (315)	-2,3067	-520* (168)
GDP per kapita sektor pertanian kuadrat	23,25 (5,505)	17,61 (13,47)	-	22,18* *7,18)
GDP per kapita sektor industri	-3,3997 (2,542)	-3,0481 (6,222)	-0,8809** (0,3028)	-3,6281 (3,317)
GDP per kapita sektor industri kuadrat	0,1124 (0,1114)	-0,1113 (0,2727)	-	0,1290 (0,1454)
GDP per kapita sektor lainnya	56,25*** (10,67)	74,76 (26,12)	0,1424 (0,4416)	66,44** (13,92)
GDP per kapita sektor lainnya kuadrat	-2,1966*** (0,4139)	-2,9384 (1,013)	-	-2,6021** (0,5402)
Harga beras	0,5254*** (0,0406)	0,4343** (0,0994)	0,5985*** (0,1479)	0,4766*** (0,0530)
R2	0,9988	0,9933	0,9506	0,9980
Adjusted R2	0,9948	0,9698	0,9110	0,9911

Keterangan : angka dalam tanda () adalah standar deviasi

\* nyata pada taraf 0,2; \*\* nyata pada taraf 0,04; \*\*\* nyata pada taraf 0,01

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berbeda dengan hipotesis "trickle down", PDB agregat ternyata tidak berpengaruh nyata terhadap insiden kemiskinan di Indonesia. PDB baru berpengaruh nyata bila didisagregasi menurut sektor. Dampak PDB terhadap insiden kemiskinan bervariasi menurut sektor. PDB berdampak lebih besar terhadap kemiskinan di pedesaan, sedangkan kemiskinan di perkotaan terutama dipengaruhi oleh PDB sektor industri. PDB sektor lain (non pertanian - non industri) juga berpengaruh terhadap kemiskinan di pedesaan. PDB sektor industri tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan total (desa+kota). Kemiskinan agregat dipengaruhi oleh PDB sektor pertanian dan sektor lain non-industri.

Selain oleh PDB per kapita, insiden kemiskinan juga dipengaruhi oleh harga beras. Penurunan harga beras dapat menurunkan insiden kemiskinan. Indeks harga makanan juga berpengaruh nyata terhadap insiden kemiskinan, namun ini terutama karena harga beras merupakan salah satu komponen utama indeks harga makanan tersebut.

Strategi pembangunan yang lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan ialah yang menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian (*agricultural sector led development*) dan sub sektor tanaman pangan khususnya. Pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan sektor industri kurang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, gagasan untuk menjadikan *agribisnis system led development* sebagai strategi dasar pembangunan nasional kiranya perlu diwujudkan bilamana kita sepakat untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, M.S., (1985). *Rural Poverty, Agricultural Production and Prices: A Reexamination*. In J.W. Mallor and G.M. Desai (Eds.), *Agricultural Change and Rural Poverty: Variation in a Theme by Dharma Naram*, p.59-75. Baltimore, USA: Johns Hopkins University Press.
- Anderson, K., (1987). *On Why Agricultural Declines With Economic Growth*, *Agricultural Economics* 1 (3): 195-207.

- Chatterjee, S., (1995). Growth, Structural Change and Optimal Poverty Interventions. *Occasional Paper No.13*. Asian Development Bank, Manila.
- Desai, G.M., (1985). Trends in Rural Poverty in India: An Interpretation of Dharma Narain. In J.W. Mellor and G.M. Desai (Eds.) *Agricultural Change and Rural Poverty: Variation on a Theme by Dharma Narain*, p.1-6. Baltimore, USA: Johns Hopkins University.
- Ghoser, M. (1993). Test of Trickle-Down Hypothesis in Rural Bengal. *Indian Journal of Agricultural Economics* 48(2): 216-225.
- Irawan, P.B. and H. Romdiati, (2000). Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kemiskinan dan Implikasinya untuk Strategi Pembangunan dalam A.K. Seta, et. al. (Ed), *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII*, hal. 193-243. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta.
- Kuznets, S., (1955). Economic Growth and Income in Equality. *American Economics Review* 45(1): 257-286.
- Sen, A., (1985). Dharma Narain on Poverty: Concept and Broader Issues. In J.W. Mellor and G.M. Desai (Eds.), *Agricultural Change and Round Poverty: Variaton on a Theme by Dharma Narain*, p.7-17. Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.
- Simatupang, P., S. Pasaribu, and S. Bahri, (2000). Indonesia's Agricultural Sector During the Turbulence of the Economic Crisis: Some Lessons. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. 19(3) : 82-91.
- Simatupang, P., (1999). Toward Sustainable Food Security : The Need for A New Paradigm. In P. Simatupang, et.al. (Eds.), *Indonesia's Economic Crisis : Effects on Agriculture and Policy Responses*, p. 141-167. CASE, Bogor-CIES.
- , (1992). Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Barter Sektor Pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi* 11(1): 37-50.
- World Bank, (1990). *World Development Report: Poverty*. Washington, D.C.

Tabel Lampiran 1

*Dugaan Regresi GDP Agregat per Kapita, Harga Barang Konsumsi dan Tren Waktu Terhadap Kemiskinan di Pedesaan*

Peubah bebas	Model-1	Model-2	Model-3
Konstanta	504 (312)	360 (211)	187 (194)
GDP agregat per kapita	-76,36 (46,48)	-54,92 (31,29)	-29,58 (28,66)
GDP agregat per kapita kuadrat	2,8737 (1,725)	2,0719 (1,159)	1,1519 (1,059)
Indeks harga konsumen	1,8096 (0,8531)	-	-
Indeks harga makanan	-	1,4359* (0,3642)	-
Harga beras	-	-	1,3483** (0,2946)
Tren waktu	-0,2253 (0,1065)	-0,1973* (0,0533)	-0,2259** (0,0517)
R <sup>2</sup>	0,7985	0,9068	0,9262
Adjusted R <sup>2</sup>	0,6373	0,8322	0,8672

Keterangan : angka dalam tanda ( ) adalah standar deviasi

\* nyata pada taraf 0,05; \*\* nyata pada taraf 0,01

**Tabel Lampiran 2**  
**Dugaan Regresi GDP Agregat per Kapita, Harga Barang Konsumsi dan Tren Waktu Terhadap Kemiskinan di perkotaan**

Peubah bebas	Model-1	Model-2	Model-3
Konstanta	205 (260)	90,76 (177)	-50,71 (165)
GDP agregat per kapita	-30,51 (38,71)	-13,29 (26,16)	7,2031 (24,37)
GDP agregat per kapita kuadrat	1,1246 (1,437)	0,4811 (0,9688)	-0,2632 (0,9001)
Indeks harga konsumen	1,4473 (0,7107)	-	-
Indeks harga makanan	-	1,1650* (0,3045)	-
Harga beras	-	-	1,0914** (0,2504)
Tren waktu	-0,1675 (0,0888)	-0,1473* (0,0445)	-0,1701** (0,0440)
R2	0,8652	0,9372	0,9486
Adjusted R2	0,7573	0,8870	0,9075

Keterangan: angka dalam tanda () adalah standar deviasi

\* nyata pada taraf 0,05; \*\* nyata pada taraf 0,01

Tabel Lampiran 3

*Dugaan Regresi Perilaku Kemiskinan di Pedesaan dengan Disagregasi GDP Menurut Sektor Pertanian dan Non-Pertanian*

Peubah bebas	Model-1	Model-2	Model-3
Konstanta	6352* (1386)	5017* (1176)	4567** (759)
GDP per kapita sektor pertanian	-1123* (261)	-892* (217)	-825** (138)
GDP per kapita sektor pertanian kuadrat	47,94* (11,19)	38,15* (9,28)	35,14** (5,870)
GDP per kapita sektor non pertanian	35,60 (28,93)	31,21 (20,79)	39,11 (12,56)
GDP per kapita sektor non-pertanian kuadrat	-1,4304 (1,117)	-1,2475 (0,8043)	-1,5284 (0,4853)
Indeks harga konsumen	0,8837 (0,4893)	-	-
Indeks harga makanan	-	0,8618 (0,2824)	-
Harga beras	-	-	0,8785* (0,1633)
Tren waktu	-0,0417 (0,0844)	-0,0840 (0,0644)	-0,1211 (0,0434)
R2	0,9723	0,9859	0,9946
Adjusted R2	0,9170	0,9578	0,9837

Keterangan: angka dalam tanda () adalah standar deviasi

\* nyata pada taraf 0,05; \*\* nyata pada taraf 0,01

**Tabel Lampiran 4**  
***Dugaan Regresi Perilaku Kemiskinan di Perkotaan dengan Disagregasi GDP***  
***Menurut Sektor Pertanian dan Non-Pertanian***

Peubah bebas	Model-1	Model-2	Model-3
Konstanta	4,995* (1228)	3958* (1122)	3625* (926)
GDP per kapita sektor pertanian	-907* (231)	-727* (207)	-678* (169)
GDP per kapita sektor pertanian kuadrat	38,694* (9,9098)	31,08* (8,85)	28,99* (7,20)
GDP per kapita sektor non pertanian	50,56 (25,62)	46,95 (19,83)	53,01* (15,33)
GDP per kapita sektor non-pertanian kuadrat	-2,0108 (0,9890)	-1,8608 (0,7664)	-2,0768* (0,5921)
Indeks harga konsumen	0,6559 (0,4333)	-	-
Indeks harga makanan	-	0,6580 (0,2694)	-
Harga beras	-	-	0,6674* (0,1992)
Tren waktu	0,0071 (0,0748)	-0,0422 (0,0615)	-0,0968 (0,0530)
R2	0,9791	0,9877	0,9922
Adjusted R2	0,9373	0,9630	0,9767

Keterangan: angka dalam tanda () adalah standar deviasi

\* nyata pada taraf 0,05; \*\* nyata pada taraf 0,01 ■